

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hardiyansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik*. Palembang: Gava Media.
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Mulyana, Deddy. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin, Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana.
- Moenir, A.S. 2014. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pusaka.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2017. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kriswahyu. 2017. *Standar Pelayanan Publik sesuai UU No 25 Tahun 2009 Survei Ombudsman RI*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia
- Ismaniah. 2021. *Potret Pelayanan Terpadu Perizinan SIUP di Kota Bekasi*. Yogyakarta: Bintang Pusaka Madani.
- Duadji Noverman, dkk. 2019. *Ilmu Administrasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Karnatohadi, Pung. 2020. *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Razy, Fakhruddin. 2020. *Hukum Admnistrasi Negara*. Purwokerto: CV Pena Persada.
- Purwanto, Erwan Agus, dkk. 2016. *Pelayanan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Syahrudin. 2020. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.
- Ridwan HR. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

Jurnal:

- Bilyastuti, Mai Puspadyna. 2019. Pelayanan Publik DPMPTSP Kab.Ponogoro dengan SIJITU (Sistem Informasi Perizinan Terpadu). *Jurnal Reformasi*. Vol. 9 No. 1. h.83.
- Maulana, Rifky. Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan. *Jurnal Justisia*. Vol. 3 No. 1. 2018. h.95.
- Wirijadinata, Jat Jat. Standar pelayanan Publik dalam Merealisasikan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. (Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I). *Jurnal Wacana Kinerja*. Vol. 10 No. 4. h.3.
- Nurhadi. 2018. Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 2 No. 2. h. 148.

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Walikota Serang Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintahan Kota Serang
- Peraturan Walikota Serang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang.

Skripsi:

- Ikrar Bhakti Suhada. 2022. *Implementasi Pelayanan Publik Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Pembuatan E-KTP di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Abdul Roup. 2020. *Penerapan Prinsip Pelayanan Publik Kota Jakarta Barat (Studi Kasus Kecamatan Grogol Petamburan, Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang 30 Tahun 2014 AAUPB)*. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Fitri Rahmadani. 2019. *Analisis Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau.

Artikel:

- Edwia Putri. 2019. Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara, ResearchGate:
<https://www.researchgate.net/publication/336879586>

Link:

- <https://repository.uir.ac.id/356/2/bab2.pdf> (diakses 20 Desember 2022 pukul 18.30 WIB).
- <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pentingnya-standar-pelayanan-publik> (diakses 01 Januari 2023 pukul 13.10 WIB).
- <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik> (Diakses 20 Januari 2023 pukul 18.25 WIB)
- <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses 16 Oktober 2023 pukul 13.10 wib)